

BUDAYA POLITIK INDONESIA (Suatu Kajian Perubahan Dari Old Society ke New State)

Oleh :Cholitin
(FPIPS IKIP Yogyakarta)

Abstrak

Perubahan budaya politik Indonesia dapat dikaji dari kehidupan masyarakat lama atau masa sebelum kemerdekaan (*old society*), sampai ketika menjadi negara merdeka (*new state*). Penglihatan yang demikian, berarti melihat perubahan dari masyarakat kawula (feodalistik) ke masyarakat warga (*civil society*).

Ternyata budaya politik pada *new state*, masih diwarnai secara dominan oleh budaya politik *old society*. Bahkan dapat dinyatakan budaya politik kita berjalan ditempat. Dengan demikian permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat kita dewasa ini, bagaimana mencari model strategi perubahan yang dapat mempercepat terwujudnya budaya politik demokratis yang merupakan karakteristik *new state*.

Strategi perubahan budaya politik yang dapat digunakan, misalnya mencari elemen budaya politik yang dualisme dan kontradiktif yang bersifat kohesif, membiarkan proses dialektis sehingga terjadi antitesis dimana sintesa lama (feodalistik) diganti dengan sintesa baru (budaya modern/demokratis). Keberhasilan kedua strategi ini, terutama sangat ditentukan peran pemerintah sejauh mana memiliki kemauan politik untuk mewujudkan budaya politik demokratis. Strategi perubahan lain, berasal dari masyarakat yang dikenal sebagai mediating structures. Strategi ini, memfokuskan pada keberdayaan masyarakat supaya mampu mengcounter terhadap budaya politik feodalistik yang sentralistik dan otoriter --yang secara dominan mewarnai budaya politik penguasa dewasa ini --sehingga pada akhirnya dapat diwujudkan masyarakat yang otonom (*civil society*).

Kata Kunci = Budaya, Politik, Indonesia

PENGANTAR

Kebudayaan politik suatu bangsa, merupakan distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Orientasi terhadap obyek-obyek politik mencakup : kognitif, afektif dan evaluatif (Almond dan Verba, 1984 : 16).

Pengetahuan seseorang tentang sistem politik, tokoh-tokoh politik, kebijakan yang diambil negara merupakan orientasi kognitif terhadap sistem politik. Perasaan seseorang berupa penerimaan atau penolakan terhadap aspek-aspek dalam sistem politik, misalnya setuju atau menolak sistem pemilu yang ada, setuju atau menolak keterlibatan militer dalam pengambilan keputusan politik, merupakan contoh orientasi afektif terhadap sistem politik. Penilaian seseorang terhadap sistem politiknya berdasarkan nilai moral yang

dipercayainya dapat saja berupa penilaian baik atau sebaliknya merupakan orientasi evaluatif terhadap sistem politiknya. Misalnya, pecalonan calon wakil Presiden dinilai kurang baik, sebab kurang transparan; mekanisme pengambilan keputusan lewat musyawarah -mufakat adalah baik, sebab dapat memenuhi aspirasi berbagai kepentingan (demokratis).

Ketiga orientasi tersebut dalam realitas, merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Maksudnya kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian terhadap sistem politiknya, akan dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap yang telah dimiliki sebelumnya mengenai sistem politiknya.

Budaya politik suatu bangsa sesungguhnya tidak lepas dari pengaruh dari nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakatnya. Misalnya, pada waktu masuk menjadi a *new state*, tetapi nilai-nilai sosial yang kuat sebagai warisan pada tahap *old society* itu feodalistik, maka dapat saja budaya politik yang berkembang sangat dipengaruhi feodalisme. Padahal, yang dikehendaki dalam *new state* adalah budaya politik yang modern (demokratis).

Dalam kondisi demikian, dapat menghadirkan ketegangan-ketegangan antara keduanya. Untuk itu perlu upaya perubahan kearah budaya politik yang lebih egalitarian -- yang diharapkan akan mampu mewujudkan *civil society*. Tulisan ini hendak mendeskripsikan bagaimana proses perubahan budaya politik dari *old society* ke *new state*, dan mengajukan strategi perubahannya.

BUDAYA POLITIK PADA OLD SOCIETY

Pada waktu masih berada pada *old society* (sebelum terbentuknya nation state/negara RI), sifat-sifat utama yang mendukung demokrasi telah dikenal dalam masyarakat. Hal ini dapat dipahami dari pendapat Hatta yang menyatakan bahwa "untuk mengembangkan sistem demokrasi yang tidak seluruhnya bersifat politik, kita telah memiliki asas atau pijakannya Asas atau pijakan yang dimaksud Hatta itu adalah kedaulatan rakyat, yang sebenarnya tidak asing bagi rakyat Indonesia, karena tiga sifat utama yang dikandungnya,

yaitu cita-cita rapat, cita-cita protes massa, cita-cita tolong menolong telah dikenal dalam demokrasi tua di tanah air kita di dalam cita-cita rapat dan cita-cita massa protes dapat dibangun demokrasi ekonomi, sedangkan dalam cita-cita tolong menolong bisa menjadi dasar demokrasi ekonomi "(Syamsuddin Haris, 1995:117). Menurut Hatta, demokrasi asli yang dikemukakannya itu adanya pada tingkat desa, sebab diatas itu yang berlaku bukan daulat rakyat, melainkan daulat Tuanku. Selain itu, dasar-dasar demokrasi desa tersebut terlalu sederhana untuk susunan pemerintahan bagi Indonesia merdeka yang begitu luas dan majemuk.

Sedangkan Kuntowijoyo (199:62-64) menyatakan ada 2 pusaka budaya politik bangsa yaitu budaya afirmatif (penguah kekuasaan) yang feodalistik yang merupakan tradisi politik BU (Budi Utomo) dan budaya politik *critical* (pemawas terhadap kekuasaan) yang demokratis sebagai tradisi politik SI (Serikat Islam)". Nurcholis Madjid dalam hal ini, "menggolongkan budaya pedalaman yang feodalistik dan budaya pesisir yang demokratis" (Harian Republika, edisi 3 September 1996).

Meskipun pada *old society* sudah dikenal budaya demokrasi, tetapi terbatas pada tataran masyarakat desa dan sebatas sebagai nilai-nilai sosial, bukan merupakan budaya politik sebab pada tataran penguasa / raja yang berlaku budaya politik feodalistik. Budaya bangsa yang sangat berpengaruh secara menonjol adalah budaya Jawa yang dikembangkan dari konsep kawulagusti. Soemarsaid Moertono (1985 : 19) menyatakan " keterikatan orang Jawa kepada konsep kawula-gusti menjadikan komunikasi sosial suatu seni yang halus dan rumit dalam dirinya sendiri karena orang harus hati-hati menjaga tempatnya sendiri seraya memiliki perhatian kekeluargaan terhadap satu sama lain ". Konsep kawula-gusti sangat hirarkhis, lapisan masyarakat dibagi atas wong cilik (orang biasa) dan penggede (golongan penguasa), yang berkonsekuensi terjadinya perbedaan hak dan kewajiban, dan perbedaan ini bersifat pinesti (ditentukan) atau merupakan takdir. Budaya yang lahir dari konsep kawula-gusti bersifat feodalistik, tidak demokratis.

Dalam proses selanjutnya, budaya keraton yang feodalistiklah yang berkembang sebagai budaya nasional, bukan budaya desa sehingga tidak berlebihan jika Soetandyo Wigsoebroto (Hairus Salim HS. dan Anggar Jati Wijaya (editor). 1996:71) sampai pada pendapat bahwa " Indonesia suatu negeri yang sesungguhnya tak memiliki tradisi demokrasi dengan kebebasan para warga masyarakat untuk mengeluarkan opini-opini guna mencadangkan alternatif-alternatif yang melawan kemapanan, dan untuk berserikat guna menggalang sinergi yang akan

merealisisasi opini-opini alternatif itu. Selain itu, Indonesia adalah suatu negeri yang sesungguhnya tak memiliki tradisi kultur politik yang egalitarian dengan hak-hak warga masyarakat untuk secara asasi diperlakukan tanpa diskriminasi apapun".

BUDAYA POLITIK PADA NEW STATE

Dalam perkembangan baru ini (*a new state*), menurut Soetandyo (1997:47-48) dalam makalahnya " Indonesia : Nation State Atau Imperium State ?", menyatakan " tak pelak lagi masyarakat-masyarakat lokal yang terbilang *old societies* yang tradisional itu akan tersubordinasi di bawah kekuasaan dan oleh kebijakan-kebijakan *the new state*. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa masyarakat-masyarakat lokal yang terbilang *old societies* itu tidak bertransformasi secara adaptif ke struktur-struktur dan fungsi-fungsi yang baru. Dalam perkembangan tersimak suatu transformasi yang menggerakkan masyarakat-masyarakat lokal yang semula demikian feodalistik --dengan anggota-anggota masyarakat yang diperlukan sebagai kawula atau hamba -- menuju ke bentuk wujudnya yang baru sebagai masyarakat baru berperan sebagai infrastruktur komunitas politik nasional yang disebut 'negara bangsa'".

Masyarakat baru (negara Indonesia merdeka atau *the new state*), anggota masyarakat tidak lagi dipandang dan diperlakukan sebagai hamba atau *kawula*, melainkan sebagai warga. Dalam masyarakat baru yang berlingkup nasional ini, sering dikenal sebagai masyarakat warga (*civil society*). Tentang masyarakat warga, Soetandyo (1997 : 48) menggambarkan sebagai berikut : "*Civil society* adalah masyarakat warga, dan bukan masyarakat kawula. Manakala berperan dalam kehidupan bernegara, warga masyarakat ini akan disebut 'warga negara', dan akan disebut --dengan akibat diperlakukan sebagai --kawula negara. Maka dalam kehidupan yang baru ini, baik aktivitas kehidupan bermasyarakat maupun dalam aktivitas kehidupan bernegara, para anggota masyarakat yang semula berstatus sebagai 'kawula' pengemban beban kewajiban (dan harus hidup dalam suatu sistem serba-keterikatan) itu kini serta merta akan memperoleh statusnya yang baru sebagai subyek penyanggah hak (dan yang oleh sebab itu harus dapat menikmati suatu sistem kehidupan yang serba-berkebebasan)".

Proses perubahan dari *old society* yang feodalistik --yang menempatkan anggota masyarakat sebagai kawula -- ke *new state* yang demokratis --yang menempatkan anggota masyarakat sebagai warga -- ternyata mengalami ketegangan-ketegangan (*strank*). Dengan kata lain, kedua pusaka budaya bangsa yaitu

feodalistik dan sifat-sifat utama budaya demokratis sewaktu memasuki a new nation state saling berhadapan satu sama lain.

Ketegangan itu antara lain tercermin dari perdebatan antara dr. Soetatmo dan dr. Tjipto Mangunkusumo tentang ikrar berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia (Sumpah Pemuda 1928), pada tahun 1932. "Dokter Soetatmo mengatakan, nanti kalau kita terlepas dari kolonial, kita akan mendirikan kerajaan Jawa. Sedangkan dr. Tjipto justru akan menciptakan / mendirikan Indonesia Raya (dari sabang sampai Merauke). Jadi, Soetatmo lebih realistik dilihat dari segi budaya, sedangkan Tjipto berpikir lebih idealistik dari kacamata politik " (Soetandyo.1997:46).

Ketegangan lain, tampak pada pemikiran para pendiri negara yang menghendaki negara dominan (diwakili Soekarno dan Soepomo), dengan yang berorientasi warga negara yang kuat (diwakili Hatta dan Yamin). Pemikiran Soepomo tersebut, tergambar pada konsep negara integralistik. "Konsep negara integralistik diuraikan dengan menggunakan metafora keluarga, dan pada kenyataannya memang disebut sebagai negara-keluarga. Dalam keluarga ideal, anak-anak dipelihara dan dilindungi oleh orangtua dengan penuh rasa kasih sayang : mereka tidak memerlukan perlindungan hak-hak asasi terhadap orang tua. Dalam negara integralistik yang dianjurkan oleh Soepomo pada tahun 1945, rakyat tidak membutuhkan hak-hak asasi. Hak-hak tersebut dianggap sebagai perwujudan pemikiran individualistik yang menentang semangat kebersamaan keluarga" (Adnan Buyung Nasution. 1995 :426).

Pergumulan tersebut, berakhir dengan kompromi. Hal itu, terlihat pada kandungan Konstitusi / UUD 1945 yang menempatkan negara pada posisi yang kuat, misalnya dianutnya sistem Presidensial, dan dimilikinya wewenang eksekutif bersama legeslatif dalam membuat undang-undang. Dan dimasukkannya hak-kewajiban warga negara / hak asasi manusia. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa yang diidealkan adalah kuatnya negara, harus tetap menjamin hak-kewajiban asasi (HAM).

Konsekuensi atas dijaminnya HAM, berarti tidak lagi dikenal diskriminasi antara Gusti dengan kawula, yang ada adalah kedudukan mereka yang baru sebagai warga negara yang sebangsa-- yang bersifat egalitarian.

Soepomo, sesungguhnya " telah meninggalkan pikiran negara persatuan (negara menyatu dengan masyarakat

sebagai kesatuan yang menyeluruh) atau negara kekeluargaan (family state) ketika dia terlibat dalam penyusunan UUD 1949 dan juga ketika memimpin Panitia Perancang UUD 1950 dengan tugas memasukkan essensi dari UUD 1945 ke dalam undang-undang dasar yang baru" (Adnan Buyung Nasution. 1995 : 426). Mengapa Soepomo, meninggalkan konsep negara integralistik yang diperjuangkannya ? Adnan Buyung Nasution (1995:426) menyatakan : "Kita bisa menduga bahwa waktu itu Soepomo telah belajar dari pengalaman selama adanya negara Indonesia bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM ternyata dapat juga dilakukan oleh orang-orang Indonesia".

Namun paham negara integralistik dalam perkembangannya masih cukup kuat berpengaruh dalam pemikiran politik penguasa di Indonesia, sampai sekarang. Seperti dikemukakan David Bourchier, (Wawancara Mingguan Adil, edisi 10 - 16 Desember 1997, hlm. : 26) pakar politik dari Australia yang menyusun disertasinya, tentang :Konsep Negara Kekeluargaan / Integralistik di Indonesia", menyatakan : "Saya lihat di Indonesia, orang yang menuntut pemisahan kekuasaan, kebebasan berbicara, kebebasan pers maupun kebebasan berorganisasi, dituduh kebarat-baratan, tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia dan sebagainya. Hal itu terjadi khususnya sejak munculnya ide negara integralistik pada tahun 80-an, yang banyak dipakai sebagai alat untuk memukul orang-orang yang memperjuangkan kehidupan demokrasi di Indonesia". Lebih lanjut ia menyatakan bahwa konsep negara kekeluargaan, bukanlah karakteristik Indonesia. Sebab, konsep seperti negara-negara integralistik --atau dalam disertasi saya menggunakan istilah organisme -- memang mirip dengan apa yang muncul pada abad lalu di Jerman dan yang dipakai juga oleh banyak rezim fasis di Eropa pada tahun 1920-an dan 1930-an. Juga di Jepang pada tahun 1920-an dan 1930-an. Dan istilah integralistik, juga digunakan di Amerika Selatan, misalnya pada saat munculnya diktator Pinochet pada tahun 1970-an di Chili, ada kelompok yang menamakan dirinya integralis yang menjadi penasihat ideologi paling penting. Juga di Brasil pada tahun 1920-an dan 1930-an ada gerakan-gerakan sayap kanan juga disebut integralismo. Jadi sekali lagi, jika dilihat dari sisi sejarah, sebenarnya tidak unik, tidak khas Indonesia.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa integralistik, merupakan konsep khas konservatisme dan bahkan otoriterisme. Yang berarti merupakan konsep yang universal. Adnan Buyung Nasution (1995:427), adalah konteks ini menyatakan bahwa " konsep negara integralistik merupakan pengingkaran terhadap hakikat permasalahan negara konstitusional, yaitu bahwa kekuasaan pemerintah pada

hakekatnya selalu menjadi masalah dan ini berlaku universal, yang menuntut cara-cara khusus di bawah kondisi-kondisi modern untuk mencegahnya menjadi despotis".

Pada awal perjalanan *a new nation state*, ada kecenderungan budaya demokratis yang lebih berkembang dengan berlakunya demokrasi parlementer. Akan tetapi hal itu berjalan tidak begitu lama, bukan karena tidak cocoknya budaya demokrasi tetapi lebih disebabkan karena orang-orang partai politik lebih berorientasi kepada kepentingan kelompok dari pada kepentingan rakyat banyak (demokrasi). Disamping itu, budaya politik rakyat, masih pada *old society* yaitu lebih sebagai kawula, meskipun sudah masuk pada new state. Karena pada waktu kita memasuki new state, sesungguhnya budaya politik elite dan masyarakat kita masih didominasi budaya politik *old society* yang feodalistik.

Periode demokrasi parlementer yang relatif akomodatif terhadap nilai-nilai budaya demokrasi yang dibarengi semakin melemahnya negara mengalami pergumulan kembali dengan orientasi perlunya negara yang kuat. Dalam pergumulan ini, orientasi pada negara yang kuat yang menang dengan lahirnya demokrasi terpimpin. Pemikiran tentang manunggalnya demokrasi dengan kepemimpinan dapat dipahami dari pemikiran Sutatmo Suriokusumo (1888-1924), yang menyatakan "agar tercapai masyarakat sama rata sama rasa tanpa merusak tata-tentrem-karta-raharja, demokrasi harus disertai kebijaksanaan (demokrasi *enwijsheid*). Kebijaksanaan itu sendiri hanya bisa datang dari sang pandito yang telah melakukan tapa brata, dan sang pandito itulah yang memimpin keluarga atau negara" (Syamsuddin Haris, 1995:120).

Tentang gambaran demokrasi terpimpin, Adnan Buyung Nasution (1995:427), menyatakan "Perlu ditambahkan bahwa konsep negara integralistik lebih berpengaruh di luar dari pada di dalam Konstituante. Demokrasi terpimpin telah dimulai pada tahun 1957 dengan Konsepsi presiden, dengan slogan bahwa semua anggota keluarga harus makan di satu meja dan bekerja di satu meja kerja untuk menganjurkan pembentukan kabinet gotong; royong, yang terdiri dari semua partai besar dan mewakili aliran pemikiran nasionalis, Islam, dan komunis. Demokrasi terpimpin membenarkan penolakan sistem parlementer dengan asumsi bahwa melawan Pemerintah sama dengan menantang ayah sendiri. Konsep negara integralistik inilah yang akhirnya menggeser konsep negara konstitusional yang diperjuangkan oleh Konstituante dengan segala kekurangannya

Dengan demikian pada masa demokrasi

terpimpin budaya feodalistik memperoleh persemaian yang subur. Kondisi ini, berkelanjutan pada masa orde baru dimana lembaga kepresidenan sangat dominan bahkan ada kesan sakral dari kritik dan kontrol rakyat. Bahkan Adnan Buyung Nasution (1995:434), menggambarkan bahwa pendapat Presiden (Soeharto) mengenai pertanggungjawabannya dengan cara yang amat dekat dengan konsep tanggung jawab seorang rajaJawa :

Alhamdulillah, sampai sekarang saya tidak merasa gagal dalam memegang dan melaksanakan tugas saya saya tak pernah merasa gagal Apa yang ditugaskan kepada saya, saya kerjakan dengan sebaik-baiknya, sambil memohon bimbingan dan petunjuk kepada Tuhan.

Mengenai kesalahan, saya pikir, "Siapa yang mengukur salah itu? Siapa yang menyalahkan?" Sekarang misalnya pekerjaan sudah saya laksanakan, berjalan baik dan berhasil, menurut ukuran saya. Tetapi kalau ada orang lain yang melihat hasil pekerjaan saya itu dari segi yang lain, lalu menilai salah atau gagal, maka saya akan berkata, "Itu urusan mereka". Saya percaya, bahwa apa yang saya kerjakan, setelah saya memohon petunjuk dan bimbingannya, itu adalah hasil bimbingan Tuhan.

Budaya politik feodalistik di masa orde baru berkembang semakin subur, juga karena ditopang keterlibatan militer dalam politik yang sangat dominan - dan birokrasi yang lebih berorientasi ke atas, daripada ke bawah. Yahya Muhaimin (Alfian & Nazaruddin Sjamsuddin, penyunting, 1991:58-59) menggambarkan tentang tradisi militer dan kelompok sipil sebagai berikut : "Tradisi militer sangat mengutamakan hirarki dan komando yang ketat ; segala gerak dan tindakannya dibatasi oleh berbagai macam pembatasan. Militer juga menitikberatkan suasana penciptaan keamanan fisik. Di lain pihak, kehidupan kelompok sipil dilandasi oleh tradisi yang penuh keleluasaan dan juga persamaan. Hirarki yang ada pada kelompok ini bersifat jauh lebih longgar dan insidental. Karenanya mereka mengutamakan tradisi dan susana yang penuh kelonggaran serta keleluasaan berpikir dan bertindak".

Tampak antara tradisi militer dan sipil merupakan sesuatu yang bersifat kontradiktif. Begitu pula pusaka budaya bangsapun pada dasarnya bersifat dualistis. Tidak mengherankan jika dalam realitas meskipun struktur politik sudah bersifat modern (demokratis), tetapi tidak mampu berfungsi dengan semestinya, karena budaya yang dominan adalah masih tradisional (feodalistik).

Umar Kayam (Harian Kompas, edisi 17 Januari 1998 :1 dan 15), memberikan gambaran tentang kondisi kebudayaan dewasa ini, sebagai berikut. "Yang terjadi sekarang ini ramuan-ramuan itu (budaya, pen.) sedang tumpang tindih, dan cenderung ruwet. Padahal, sintesa-sintesa baru yang tumbuh dari masyarakat itu diharapkan merupakan antitesa terhadap sintesa lama. Sintesa lama itu sistem absolut feodalisme, sistem ekonomi agraris --yang apa mau dikata --masih saja dipraktekkan oleh sistem kekuasaan yang lebih dominan".

Berbagai gambaran tentang realitas budaya politik dimuka, menunjukkan bahwa sesungguhnya kita secara dominan masih dikuasai budaya politik feodalistik (*old society*), meskipun kita telah lama secara formal berada pada negara baru/modern (*new state*). Dengan kata lain, masyarakat kita isinya masih didominasi budaya lama meskipun wadahnya sudah baru. Masalah ini, merupakan sesuatu yang krusial untuk segera dicarikan jalan keluarnya.

STRATEGI PERUBAHAN

Jika menengok ke belakang, bahwa Indonesia telah memilih lebih dahulu membentuk *nation state* diproklamasikan, daripada menyiapkan lebih dahulu *civil society* --baru kemudian mewujudkan *nation state*. Pilihan ini menurut Soetandyo (1997:5) dalam makalahnya "Masyarakat Warga, Kesadaran Berbangsa Dan Keberdayaan Warganya Dalam Kehidupan Negara Baru", membawa konsekuensi perlunya mediating structures. Yaitu sejumlah institusi yang berfungsi sebagai pengantar yang mendekatkan kehidupan privat para warga ke kehidupan publik yang luas dalam konteks kehidupan bernegara bangsa yang berskala besar, lewat suatu proses pendidikan politik yang tak hanya ekstensifkan tetapi juga intensif.

Selama ini, mediating structures, seperti keluarga, organisasi-organisasi keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan, asosiasi-asosiasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik --kehilangan peran yang bebas dalam mengantar warganya ke *civil society*. Hal ini terjadi, karena lembaga mediating structures telah terkooptasi oleh negara. Oleh karena itu, sudah saatnya lembaga-lembaga mediating structures harus berani keluar dari kooptasi negara, jika berkeinginan untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis. Dengan kata lain perlu adanya perubahan dari menegarakan masyarakat (negara sangat intensif dan ekstensif berintervensi dalam kehidupan masyarakat) ke arah memasyarakatkan negara (masyarakat yang secara intensif dan ekstensip melakukan kontrol terhadap negara). Sehingga negara lebih

berpihak pada publik, dibanding kepada dirinya sendiri.

Soetandyo, mengajukan *mediating structures* ini, sebagai strategi dalam memacu perubahan budaya politik pada *old society* yang feodalistik ke *new state* --yang demokratis. Sedangkan Yahya Muhaimin (Alfian & Nazaruddin Sjamsuddin, 1991:61) yang melihat masalah realitas budaya politik Indonesia yang dualistik bahkan kontradiktif (demokratis - feodalistik, sipil-militer, Jawa-luar Jawa), mengajukan pemikiran : "bagaimana memecahkan elemen-elemen yang dualistik itu dan kemudian mentransformasikannya menjadi pola-pola tingkah laku yang kohesif dalam kerangka wawasan keindonesiaan. Keberhasilan mengatasi persoalan ini akan membantu upaya memformulasikan Demokrasi Pancasila yang operasional". Dan Umar Kayam, tampak memilih strategi perubahan lewat proses dialektis, di mana sintesa lama yang feodalistik mengalami proses antitesis, sehingga dihasilkan sintesa baru --yaitu budaya yang modern --yang demokratis.

Dengan demikian paling tidak dikenali tiga strategi perubahan budaya politik dari *old society* ke *new state*. Yaitu pertama, mencari sifat kohesif dari elemen budaya dualistik bahkan kontradiktif. Sehingga dihasilkan budaya politik yang secara equilibrium mampu mewujudkan negara yang kuat -- diimbangi oleh rakyat yang kuat. Dengan kata lain eksekutif yang kuat yang didampingi oleh legislatif yang kuat pula. Eksekutif yang kuat, bukan karena sikapnya otoriter akan tetapi karena ada kesesuaian kemauan rakyat dengan pemerintah. Strategi ini, perlu dirancang terutama oleh pemerintah sebagai kekuatan yang dominan dewasa ini. Strategi kedua, yang juga memerlukan peran utama pemerintah adalah melakukan perubahan dari budaya sintesa lama (feodalistik) ke budaya sintesa baru (modern/demokratis).

Sebagai strategi ketiga, merupakan strategi yang berpangkal dari masyarakat atau arus bawah yaitu strategi mediating structures. Strategi ini baru akan efektif, jika telah terwujud *civil society*, dan dapat berfungsi sebagai counter terhadap budaya politik feodalistik yang terutama berkembang di kalangan penguasa. Oleh karena itu, keberhasilan strategi ini akan meminta waktu yang relatif lebih lama, dibanding kedua strategi di atas. Sebab mengembangkan sikap dan perilaku politik yang berdasarkan inisiatif dan kesadaran masyarakat akan lebih lama, dibandingkan dengan cara memberikan contoh tauladan dari para penguasa.

Apabila ketiga strategi di atas dapat dikembangkan secara saling melengkapi dan optimal, maka akan melahirkan perubahan dari budaya

politik yang serba didominasi dan diintervensi oleh negara dalam segala aspek kehidupan (politik, ekonomi, sosial dan budaya), ke arah budaya politik yang lebih memberikan keberdayaan otonom masyarakat. Masyarakat akan semakin mampu mengekspresikan kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta secara efektif mampu mengendalikan (mengontrol) negara.

Perubahan itu juga akan terjadi dari program pembangunan yang sangat teknokratis, terkontrol secara sentral oleh negara ke program pembangunan yang demokratis --yang bergerak karena didorong oleh inisiatif dan kreativitas dari bawah.

PENUTUP

Meskipun kita telah berada pada *new state*, tetapi budaya politik yang berkembang dewasa ini masih didominasi budaya politik *old society* yang feodalistik atau budaya politik pada sintesa lama --atau budaya politik yang berkarakteristik dualistik dan bahkan kontradiktif. Sehingga budaya politik kita sesungguhnya tidak mengalami perubahan yang berarti --masih berjalan di tempat.

Untuk itu, perlu upaya secara serius untuk melakukan perubahan ke arah budaya politik yang demokratis. Jika tidak, maka kecenderungan semakin meluasnya ruang gerak publik, seperti terlihat pada maraknya : demonstrasi, kerusuhan, kritik dan kontrol, dan aliansi beberapa kekuatan riil masyarakat --dan akhir-akhir ini timbulnya ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi (moneter), yang semuanya itu ditujukan kepada pemerintah --akan berkembang tanpa terkendali karena tidak memperoleh saluran yang proporsional.

Strategi yang dapat digunakan dalam upaya tersebut antar lain : (1) mencari elemen kohesif dari budaya politik kita yang dualistik dan kontradiktif, (2) memberikan iklim yang kondusif untuk lahirnya proses dialektis, sehingga lahir budaya sintesa baru (demokratis), dan (3) mediating structures, yaitu dengan mengembangkan lembaga-lembaga masyarakat sebagai lembaga demokratis --yang dilakukan masyarakat sendiri. Sebagai penutup, penulis menggaris bawahi saran Donald K. Emmerson (Majalah *Gatra*, No.8 Tahun IV - 10 Januari 1998, hlm. 18) Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Wisconsin Amerika Serikat dan sebagai Ahli Kepolitikan Indonesia, yang menyatakan "Kalau krisis ekonomi pada 1970-an dan 1980-an dapat diatasi dengan jalan memberikan ruang gerak lebih leluasa kepada kaum teknokrat, sudahkah waktunya sekarang membuka pula keleluasaan serupa bagi kaum demokrat".

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, Adnan Buyung. (1995). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-legal atas konstituante 1956-1969*. (Desertasi, yang telah dibukukan). Jakarta : Grafiti.
- Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin, Penyunting. (1991). *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta : Grafiti.
- Bourchier, David (1997). "Negara Kekeluargaan Bukan Realitas". Wawancara. *Mingguan Adil*, edisi 10-16 Desember 1997, halaman 26-27.
- Emmerson, Donald K. (1998). "Teknokrat, Demokrat, dan Krisis", dalam *Majalah Gatra*, No.8 Tahun IV-10 Januari 1998, hlm. 18.
- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. (1984). *Budaya Politik*. Penerjemah Sahat Simamora. Jakarta: Bina Aksara.
- Kuntowijoyo. (1994). *Demokrasi Dan Budaya Birokrasi*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Nurcholis Madjid. 1996. "Potensi Dukungan Budaya Nasional Bagi Reformasi Sosial-Politik Masa Depan". *Harian Republika*, edisi 3 September 1996, halaman 1 dan 11.
- Wignjosoebroto, Soetandyo (1996). "Hak-hak Asasi Untuk Bebas Berpendapat dan Berserikat : Sebuah Tinjauan Sosio- Yuridis". dalam Hairus Salim HS dan Angger Jati Wijaya (Penyunting). *Demokrasi Dalam Pasungan*. Yogyakarta : Forum LSM / LPSM DIY.
- _____. (1997). "Masyarakat Warga, Kesadaran Berbangsa Dan Keberdayaan Warganya Dalam Kehidupan Negara Baru". Makalah, Kuliah Masyarakat, Budaya dan Politik Indonesia, Prog. Studi Ilmu-Ilmu Sosial, Prog. Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- _____. (1997). "Indonesia : Nation State Atau Imperium State ?". Makalah, Kuliah Masyarakat, Budaya dan Politik Indonesia, Prog. Studi Ilmu-Ilmu Sosial, Prog. Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya
- _____. (1997). "Demokrasi, Demokratisasi, Dan Membangun Masyarakat warga Yang

Berkeberdayaan Di Hadapan Kekuasaan negara". Dalam Jurnal *Dinamika HAM*, Vol 1, No.01 Mei-Oktobre 1997. Pusat Studi HAM Universitas Surabaya Bekerja Sama Dengan PT Gramedia Pustaka Utama.

Moertono, Soemarsaid (1985). *Negara Dan Usaha Bina Negara Di Jawa Masa Lampau*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Haris, Syamsuddin (1995). Genealogi Gagasan Demokrasi di Indonesia, dalam *ANALISIS*. Tahun XXIV, No.2, Maret-April 1995. Jakarta : CSIS.

Kayam, Umar (1998). "Pemerintah Harus Siapkan Masyarakat Modern". *Harian Kompas*, 17 Januari 1998, halaman 1 dan 15.